

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *mekanisme pemungutan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)* atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut:

- a. Pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil di DPMPTSP Kabupaten Klaten telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dokumen pendukung pelaporan pajak, seperti bukti potong dan daftar gaji, telah dilampirkan secara lengkap dan disampaikan melalui saluran resmi seperti e-Billing dan e-Filing.
- c. Terdapat kendala administratif yang berkaitan dengan keterlambatan penginputan data serta kurangnya pemahaman teknis sebagian pegawai, namun hal tersebut dapat diminimalkan melalui peningkatan pelatihan dan evaluasi internal secara rutin.
- d. Koordinasi antara bendahara, subbagian keuangan, dan sekretariat telah berjalan cukup baik dan mendukung kelancaran pelaporan pajak.

4.2 Saran

Agar pelaksanaan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 di DPMPTSP Kabupaten Klaten dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk DPMPTSP Kabupaten Klaten:
 - Meningkatkan intensitas pelatihan rutin mengenai perpajakan khususnya terkait PPh 21.
 - Melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelaporan pajak untuk meminimalisasi kesalahan administrasi.

b. Untuk Pegawai:

- Lebih teliti dalam memeriksa kelengkapan dokumen dan data gaji yang menjadi dasar perhitungan PPh 21.
- Berperan aktif dalam memahami sistem pelaporan pajak dan regulasi yang berlaku.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya:

- Dapat meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pengawasan internal dan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak di instansi pemerintah.

Dengan perbaikan pada aspek-aspek di atas, diharapkan pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 21 di DPMPTSP Kabupaten Klaten dapat mendukung tata kelola keuangan negara yang lebih tertib, efisien, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.